

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan alokasi APBD oleh Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City dalam pengembangan Aplikasi Jakarta kini selama masa pandemi pada tahun anggaran 2021, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pemanfaatan Alokasi APBD Tahun anggaran 2021 dalam Pengembangan Aplikasi Jaki dianalisis berdasarkan teori digitalisasi sektor publik atau *e-government* Harvard JFK School of Government, dimana terdapat tiga aspek penting yang harus dimiliki dalam digitalisasi sektor publik, yaitu *support* (dukungan), *capacity* (kapasitas), dan *value* (manfaat). Dalam hal kapasitas, Jakarta Smart City memiliki sumber daya finansial dan sumber daya infrastruktur teknologi yang kuat serta sumber daya manusia yang kompeten untuk mengembangkan Aplikasi Jaki. Namun, dalam aspek dukungan, dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam konteks birokrasi masih kurang, dimana pengembangan Jaki terpaksa memprioritaskan program Pemprov DKI Jakarta yaitu KSD (Kegiatan Strategis Daerah) yang merupakan indikator pencapaian Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode Tahun 2017–2022 dan tertuang di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) setiap tahunnya. Prioritas pengembangan berdasarkan KSD ini menghambat *update* aspek-aspek yang memang bisa meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap Jaki, karena memang KSD dalam pengembangan Jaki ini mengutamakan integrasi layanan publik dari instansi Pemerintah Daerah lainnya dibanding nilai kepuasan Masyarakat terhadap Jaki. Kurangnya dukungan

ini berdampak pada aspek manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat merasakan manfaat dari Aplikasi Jaki, banyak yang tidak merasakannya, yang terlihat dalam nilai pengguna Aplikasi Jaki di platform Google Playstore, yang memiliki rata-rata nilai 3.7 dari 5 dan banyak komentar negatif dari pengguna. Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan dukungan dan fokus pada peningkatan kepuasan pengguna agar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat lebih maksimal.

4.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan penelitian, diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemprov DKI Jakarta, mulai dari Gubernur/Wakil Gubernur maupun Sekda DKI Jakarta, agar lebih melonggarkan pelaksanaan KSD bagi para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di DKI Jakarta sesuai dengan konteks maupun urgensi nya dalam mewujudkan tujuan mereka yaitu melayani masyarakat. Contohnya seperti yang terjadi pada BLUD Jakarta Smart City, dimana dalam pengembangan Aplikasi Jaki, tim pengembang lebih memprioritaskan banyak sekali integrasi fitur-fitur ke dalam Aplikasi Jaki berdasarkan KSD dibanding hal-hal yang lebih mendasar bagi Aplikasi Jaki yang dapat meningkatkan kepuasan Masyarakat pengguna Jaki, misalnya seperti desain antarmuka atau fungsionalitas fitur yang lebih mudah dan memuaskan bagi masyarakat.
2. Bagi pihak Jakarta Smart City, Diskominfotik DKI Jakarta, maupun PPID Pemrov DKI Jakarta agar lebih terbuka terhadap informasi mengenai pemanfaatan alokasi APBD di DKI Jakarta, karena masyarakat luas

seharusnya memiliki hak untuk dapat mengakses informasi mengenai anggaran tersebut. Walaupun dalam konteks penelitian ini data mengenai pemanfaatan anggaran pada klasifikasi Belanja Barang & Jasa di Jakarta Smart City pada akhirnya tidak relevan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pemanfaatan alokasi APBD dalam pengembangan Aplikasi Jaki, namun pada kasus lain, hal ini justru dapat menjadi bumerang dan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat mengenai seberapa “bersih” pemanfaatan anggaran tersebut karena informasi mengenainya yang terlalu sulit untuk diakses.

